

KEBERHASILAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA SEMARANG

¹Suharto

¹Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: hartoss@gmail.com

ABSTRAK

Dalam program pemberdayaan masyarakat selalu didorong untuk *pro poor* dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kelurahan. Secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga Negara. Untuk dapat memulihkan kembali harkat dan martabat komunitas (warga miskin) atau menuju masyarakat yang berdaya dan sejahtera, maka peran Pemerintahan Kelurahan dan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi pola pendekatan program penanggulangan kemiskinan yang sekarang baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah.

Pemerintah Kelurahan Muktiharjo Kidul mempunyai peran menjadi fasilitator, motivator, menghimpun, menyerap, mengelola aspirasi masyarakat umum kelurahan melalui rembug warga berbasis partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat yaitu penanganan program penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat mandiri, sejahtera dan berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat yang ada dan kegiatan program kebijakan Pemerintah Kota/Kelurahan. Adapun peran kelembagaan BKM, LPMK, PKK masih kurang optimal, masih perlu ditingkatkan lagi dalam membantu kelurahan dalam memajukan masyarakat kelurahan, memberdayakan SDM ditingkat kelurahan dalam menanggulangi kemiskinan, pada akhirnya membangun masyarakat mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat kelurahan.

Kata kunci : Pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, kelembagaa

ABSTRACT

In community empowerment programs, it is always encouraged to be pro poor and to provide greater opportunities for the role of the community in community empowerment, especially the poor in the Kelurahan. In general, community empowerment is an effort to restore or increase the empowerment of a community to be able to act according to their dignity and to carry out their rights and responsibilities as a human community & citizens. To be able to restore the dignity of the community (poor people) or towards a empowered and prosperous society, the role of Kelurahan Administration and institutions in community empowerment has become a pattern of poverty reduction program approaches that are currently being intensified by the Government.

The government of Muktiharjo Kidul Kelurahan has the role of being a facilitator, motivator, gathering, absorbing, managing the aspirations of the general community of the village through citizen consultation based on active participation in community empowerment, namely handling poverty alleviation programs towards an independent, prosperous and empowered community through existing community empowerment programs and activities. City / Kelurahan government policy programs. As for the institutional role of BKM, LPMK, PKK is still not optimal, it still needs to be improved again in assisting the sub-district in advancing the village community, empowering human resources at the village level in overcoming poverty, ultimately building the community to achieve the inner and outer welfare of the village community.

Key words: *Kelurahan governance, community empowerment, institutional*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan basis data terpadu PPLS 2011, saat ini di Jawa Tengah terdapat 50 kecamatan (di 15 kabupaten) dengan tingkat kemiskinan tinggi, 234 kecamatan (di 27 kabupaten) dengan tingkat kemiskinan sedang, dan 289 kecamatan (di 30 kabupaten/kota). Dari total 8.578 desa/kelurahan di Jawa Tengah, terdapat 1.479 desa/kelurahan (terdiri dari 1.356 desa dan 123 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan tinggi, 2.235 desa/kelurahan (terdiri dari 2.080 desa dan 155 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan sedang, dan 4.864 desa/kelurahan (terdiri dari 4.373 desa dan 491 kelurahan) masuk kategori tingkat kemiskinan rendah. (*sumber : paparan Kepala Bappeda Jateng pada workshop*

Peningkatan Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, Semarang 26 Agustus 2014).

Dalam kaitannya dengan peran Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, maka perlu untuk mengetahui bagaimanakah perannya dari setiap lembaga dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Karena dalam pemberdayaan masyarakat, sasaran utama adalah masyarakat yang tidak berdaya (miskin) dalam arti luas dan secara nyata sebagian besar yang miskin adalah daerah perkotaan. Kelembagaan Komunitas Lokal merupakan lembaga masyarakat lokal yang dibangun dan diperkuat sesuai kebutuhan masyarakat dalam proses transformasi sosial yang mengakar, diakui dan diterima masyarakat.

Maka dalam program pemberdayaan masyarakat selalu didorong untuk *pro poor* dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kelurahan. Secara umum pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia & warga Negara. Untuk dapat memulihkan kembali harkat dan martabat komunitas (warga miskin), pentingnya peran dari kelembagaan komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi pola pendekatan program penanggulangan kemiskinan yang sekarang baru gencar-gencarnya digalakkan Pemerintah.

Melihat pentingnya peran serta dari kelembagaan formal (birokrasi pemerintah) dan non formal dalam rangka keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangatlah strategis.. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ? Tujuan Penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peran keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh beberapa ahli dari berbagai bidang. Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sedangkan menurut Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institusional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Pada umumnya Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Sedangkan menurut Sitti Bulkis (2011), Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (line organization, military organization) lembaga garis dan staf (line and staff organization); lembaga fungsi (functional organization). Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang menfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.

Menurut Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu; 1. Fungsi pelayanan (public service) 2. Fungsi pembangunan (development) 3. Fungsi pemberdayaan masyarakat (empowering) 4. Fungsi pengaturan (regulation) Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja

Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Pada dasarnya salah satu fungsi Pemerintahan Kelurahan yang sangat penting yaitu mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu antara lain :

1. Mendorong peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat mengalami proses transformasi atau perubahan dalam kapasitasnya (skill, awareness, knowledge) dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil program / kegiatan di masyarakat. Selain itu ada kecenderungan perubahan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan atau ditingkat kelurahan.
2. Mendukung program penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan keberdayaan atau kesejahteraan masyarakat dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga komunitas lainnya maupun lembaga formil yang ada sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai dengan cepat.
3. Menanamkan tingkat kepercayaan kepada masyarakat, dengan hal ini akan mampu menggerakkan kekuatan swadaya masyarakat dan menjadi kekuatan dalam membangkitkan semangat pembangunan masyarakat lokal.

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan 'kekuasaan' (*power*). Dalam tulisan Robert Chambers (1995), kekuasaan (*power*) diartikan sebagai kontrol terhadap berbagai sumber kekuasaan, termasuk ilmu pengetahuan dan informasi. Karena itu, pemikiran penting Chambers mengenai pemberdayaan masyarakat adalah pengambilalihan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan informasi, sebagai salah satu sumber kekuasaan yang penting, dari orang luar (peneliti dan agen pembangunan) oleh masyarakat. Caranya dengan menggali dan menghargai pengetahuan dan teknologi lokal, serta menjadikan proses pembelajaran sebagai milik masyarakat, bukan milik orang luar. Selain itu, Chambers juga melihat isu kekuasaan dalam konteks pola

hubungan antara kelompok dominan/elite masyarakat dengan kelompok 'bawah', antara negara-negara miskin (dalam skala komunitas, nasional maupun global).

Menurut Parsons (1994) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Kekuasaan dalam konteks politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengatur kehidupan warga (rakyat). Kekuasaan politik harus dibatasi dengan membangun sistem demokrasi. Karena itu, salah satu prinsip dasar demokrasi adalah tersedianya ruang partisipasi warga yang mampu mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang diberi mandat oleh warga. Jadi, kekuasaan sebenarnya adalah milik rakyat, tetapi yang terjadi kemudian adalah pengambilalihan kekuasaan oleh elite politik karena belum/tidak berfungsinya sistem pemerintahan yang mungkin ditegakkannya kedaulatan rakyat. Hal ini terjadi karena rakyat belum mampu melindungi kekuasaannya. Sedangkan, pemimpin politik, cenderung untuk tidak bersedia membatasi kekuasaannya, bahkan lebih suka memperbesar kekuasaan tersebut.

Menurut Chambers (1995), pembangunan adalah upaya untuk mengembangkan tatanan hidup yang lebih baik (komunitas, nasional, maupun global), yang berarti adalah berbagi kekuasaan (*power sharing*) untuk mengembangkan keseimbangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan *power sharing*, dengan cara memperbesar daya (*empowerment*) kepada pihak yang tidak/kurang berdaya. Dan mengurangi daya pihak yang terlalu berkuasa.

Pemberdayaan memerlukan proses penyadaran kritis masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya. Pemberdayaan juga memerlukan proses pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki legitimasi pada rakyatnya. Proses untuk memberi daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan (*disempower*) kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat perlu adanya kesamaan pandang untuk konsep pengertian ini. Karena dalam pemberdayaan masyarakat jelas sasaran utama adalah masyarakat yang tidak berdaya (miskin) dalam arti luas dan secara nyata sebagian besar yang

miskin adalah di perkotaan (kantong kemiskinan). Maka dalam program pemberdayaan masyarakat (penanggulangan kemiskinan) selalu didorong untuk *pro poor* dan lebih memberikan peluang yang besar terhadap peran kelembagaan komunitas lokal.

Dengan mengetahui informasi tersebut dapat diukur sampai sejauh mana program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan khususnya telah melibatkan seluruh komponen ‘masyarakat lokal’ secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaannya maupun pelestariannya. Kecenderungan yang sering terjadi adalah program-program kegiatan/pembangunan yang ada di masyarakat kurang melihat keterlibatan masyarakat secara aktif dan masyarakat berperan serta dalam program hanya seremonial saja sehingga program tersebut kurang optimal dalam pemberdayaan masyarakat sehingga pelestarian pasca program juga kurang berjalan dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini yaitu studi kasus dengan pendekatan **kualitatif** yang menggambarkan (mendiskripsikan) tentang hasil analisis keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sumber data primer adalah responden yang terdiri dari Perangkat Kelurahan dan masyarakat umum yang berdomisili di kelurahan tersebut minimal 1 tahun, keterwakilan pengurus kelembagaan masyarakat yaitu keterwakilan RW, RT, Toma, Toga, UKM, KSM, Warga Miskin. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari dokumen atau laporan-laporan hasil kegiatan kegiatan di kelurahan. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah : Analisis deskriptif kualitatif dipergunakan untuk menganalisis data yang berasal dari hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam serta hasil data sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang..

Sebelum melihat gambaran keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, menurut Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu; 1. Fungsi pelayanan (public service) 2. Fungsi pembangunan (development) 3. Fungsi pemberdayaan (empowering) 4. Fungsi pengaturan (regulation) Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang 16 disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan.

Secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Lurah Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan

kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan.

- b. Sekretaris Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
- d. Kepala Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.
- e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- f. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan, menurut dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu camat dalam hal yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat ;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;

- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 dijelaskan kedudukan dan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan adalah : pasal 3 Kedudukan Pemerintah Kelurahan: (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui Camat. (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil. (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Pangkat/golongan minimal penata (iii/c). b. Masa kerja minimal 10 tahun. c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan d. memahami sosial budaya masyarakat setempat. 19 Pasal 4 Tugas Pemerintah Kelurahan: (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Ditegaskan pula tentang fungsi dalam pemberdayaan masyarakat pada Pasal 5 Fungsi Pemerintah Kelurahan : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

a. Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan).

Pemerintahan Kelurahan memiliki mitra (partner) kelembagaan yang dibentuk secara sosial untuk mendukung Pemerintahan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kelembagaan itu yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). LPMK adalah organisasi sosial yang mempunyai peran dan fungsi dalam meningkatkan / memperdayakan masyarakat dengan melalui lembaga RT/RW di wilayah kelurahan. Adapun Rukun Warga (RW) adalah suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang menggerakkan masyarakat di bidang sosial dalam wilayah rukun warga (RW) didalam kelurahan/desa. Tugas RW yaitu membantu pelayanan kepada warga, mengkoordinir kegiatan sosial kemasyarakatan ditingkat wilayah, menjalin kerjasama dengan lembaga sosial kemasyarakatan ditingkat kelurahan, membantu pemberdayaan potensi yang ada di wilayah. Menghimpun masyarakat warga dilingkungan masing-masing wilayah rukun tetangga (RT), menyelaraskan satu kesatuan diwilayah yang menjadi lingkup wilayah tersebut. RW juga sebagai alat atau perangkat wilayah yang membantu pemerintahan dibawah kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPMK merupakan wadah yg dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di lingkup wilayahnya. LPMK merupakan sebuah lembaga yang bertugas memberdayakan masyarakat ditingkat kelurahan diberbagai bidang. LPMK membantu kelurahan dalam memajukan masyarakat kelurahan, memberdayakan SDM ditingkat kelurahan, membuat pemetaan demografi social dan kerohanian tingkat kelurahan, menampung aspirasi masyarakat kelurahan melalui RW, membantu Pemerintah Kelurahan mencari solusi/ pemecahan masalah yang

berkembang dimasyarakat kelurahan, mencakup stabilitas politik, ekonomi, social, budaya & keamanan. LPMK sebagai sarana wadah pemersatu dari RT dan RW diwilayah Kelurahan, sebagai ujung rembug masyarakat dan sebagai mitra Lurah dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.

Menurut Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Semarang, Bab I pasal 1 butir 10 yaitu :

“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk *membantu* Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuh kembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan”

Adapun Tugas LPMK menurut pasal 10 Perda no 4 th 2009 yaitu :

LPMK mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- 2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Sedangkan kondisi LPMK Kelurahan Muktiharjo Kidul apabila dilihat dari tugasnya sesuai Perda No 4 tahun 2009 tersebut menunjukkan perannya masih kurang berhasil optimal. Maka pemerintahan kelurahan lebih mendorong dan memfasilitasi dalam tata kelola kepengurusan dan kegiatan LPMK. Oleh karena itu masih perlu ditingkatkan menjadi LPMK yang berdaya dan mandiri dalam mengemban 3 (tiga) tugas fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

b. Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) .

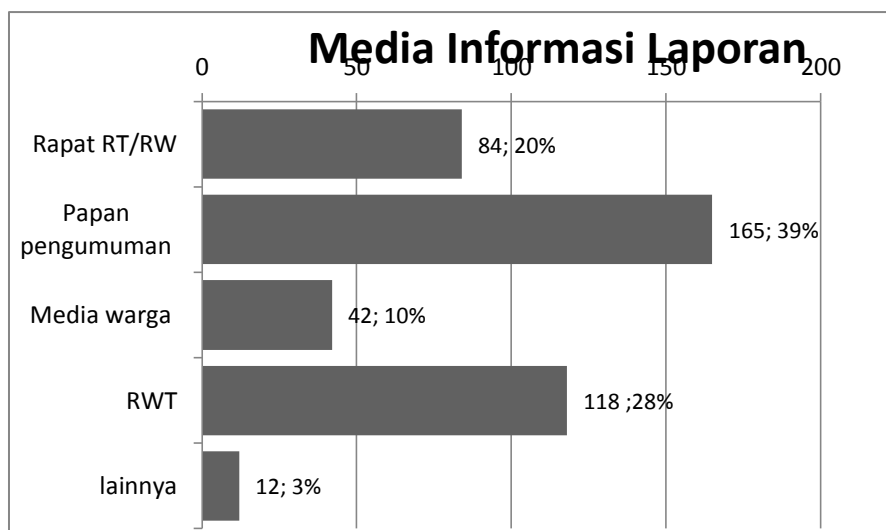
Pemerintahan kelurahan dalam hal ini memfasilitasi dan mendorong kelembagaan BKM untuk berperan dalam menghimpun, menyerap, mengelola aspirasi masyarakat umum kelurahan melalui rembug warga berbasis partisipasi aktif khususnya dalam penanganan program penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat mandiri, sejahtera dan berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat yang ada dan kegiatan program kebijakan Pemerintah Kota.

Menurut masyarakat, dari beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu bahwa kemampuan Pemerintahan Kelurahan dalam menjalankan

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, penyampaian informasi dan pelaksanaan pengawasan bersama yang dilakukan masyarakat, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di masyarakat, serta tingkat kepercayaan atau akuntabilitas yang dimiliki lewat kelembagaan BKM maupun yang disampaikan pemerintahan kelurahan kepada masyarakat langsung atau RW /RT juga dilakukan cukup baik.

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, media yang menyebarkan informasi laporan kegiatan tersebut masih sebagian diketahui oleh masyarakat lewat papan informasi/pengumuman. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat mengetahui kegiatan tersebut dari Rapat RT/RW/PKK, Media Warga/Media Sosial, Rembug Warga Tahunan(RWT), Musrenbangkel (Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan) dan pertemuan lainnya ditingkat Kelurahan, RW dan RT. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul masih perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan menghapus kesan eksklusif dalam melakukan kegiatan, karena kegiatan harus diketahui oleh semua lapisan masyarakatnya.

Diagram C1.1



Sumber : Dioalah dari hasil wawancara warga Kelurahan Muktiharjo Kidul

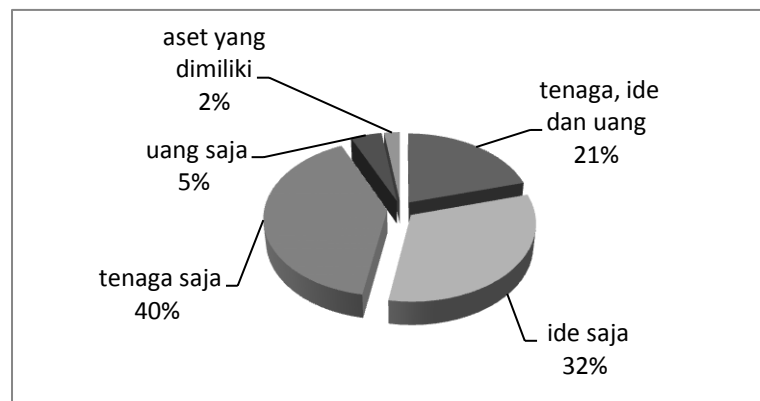
Adapun kegiatan kemitraan yang dilakukan Pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul, yang dihimpun oleh peneliti dari data sekunder menunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan lebih banyak bekerjasama dengan Dinas Pemerintah Kota Semarang dibandingkan dengan pihak swasta dalam mendukung pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya adalah rangkaian proses pembelajaran bagi masyarakat untuk melakukan kepedulian / partisipasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumberdaya untuk memecahkan permasalahan yang muncul di masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Penyadaran kritis dan pembelajaran untuk peningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan di kelurahan, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui dari kesepakatan bersama dalam rembuk masyarakat dalam berbagai tingkatan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pengawasan kegiatan secara partisipatif (secara bersama-sama) yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Penyadaran kritis ini merupakan dasar dari pola pemberdayaan masyarakat, agar nantinya masyarakat mampu melaksanakan pembangunan sendiri tanpa harus bergantung terus dengan pemerintah, dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Adapun wujud pemberdayaan masyarakat yaitu anatra lain : sebagian besar masyarakat masih memberikan kontribusi yang belum riil atau signifikan dengan kata lain nilai swadayanya masih belum bisa diukur secara nyata, yaitu yang berbentuk tenaga, ide dan konsumsi saja. Hal ini tampak dari jawaban responden mengenai kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan pembangunan, lebih banyak kontribusi dalam bentuk tenaga saja, dan yang kontribusi uang atau swadaya uang atau materi masih belum optimal tergal dari masyarakat perlu dorongan lagi.

Diagram C1.2

Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan



Sumber : Dioalah dari hasil wawancara warga Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Perlu adanya penguatan kapasitas, koordinasi dan rembug dari Pemerintah Kelurahan dengan lembaga lain (misalnya LPMK, BKM, PKK dll) dan tokoh masyarakat saat perencanaan sampai evaluasi program. Perlunya secara berkala mengadakan pertemuan dengan RT/RW dan tokoh masyarakat ditingkat kelurahan untuk lebih mendorong partisipasi maupun kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga wujud keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat lebih optimal.

c. Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran Kelembagaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat juga dibantu oleh lembaga komunitas lokal yaitu PKK. PKK merupakan organisasi wanita yang dikelola oleh ibu-ibu di wilayah RT, RW, maupun tingkat kelurahan terdiri dari : Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, Pokja I s.d IV. PKK tingkat kelurahan mengkoordinir, Ibu-ibu pengurus PKK tingkat RW. PKK RW mempunyai tugas membantu dalam membuat rencana kerja dan menerima panduan atau acuan dari PKK Kelurahan dan Kecamatan dan melaksanakan program kerja yang sudah dibuat bersama. PKK Kelurahan

melaksanakan petunjuk atau arahan dari tingkat Kecamatan dan Kota, dan disebarluaskan pada PKK Kelurahan untuk ditindaklanjuti pengurus PKK RW, RT serta masyarakat lapisan bawah.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Muktiharjo Kidul telah dilakukan melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yaitu kegiatan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat. Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga, perempuan ditingkat Kelurahan, RW dan RT sebagai sosok sentral dalam keluarga, di perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material nya.

Untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Kepala Kelurahan membentuk kelompok pengurus PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Strategi yang digunakan PKK untuk menjangkau sebanyak mungkin keluarga, adalah melalui kelompok Dasa Wisma tersebut. Dasa Wisma sebagai kelompok terkecil dari kelompok-kelompok PKK Kelurahan Muktiharjo Kidul memiliki peran strategis mewujudkan keluarga sejahtera. Untuk itu, di harapkan agar Dasa Wisma menjadi ujung tombak pelaksanaan 10 program pokok PKK dan program-program pemerintah lainnya. Dasa Wisma adalah kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK RT, RW, Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan lingkup kewilayahan RT, dan terdiri dari 10 sampai 20 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah Rukun Tetangga (RT). Salah satu dari anggota keluarga pada kelompok persepuluh dipilih untuk dijadikan ketua kelompok atau penghubung dengan Pembina. Ketua kelompok Dasa Wisma membina 10 rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya.

Informasi dari semuanya ini harus disampaikan kepada ketua kelompok PKK setingkat di atasnya yang akhirnya sampai di Tim Penggerak PKK

Kelurahan Muktiharjo Kidul. Adapun Tim Penggerak PKK Kelurahan berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak dalam pemberdayaan masyarakat yang selama ini sudah berhasil dengan cukup baik.

C.2. Permasalahan atau Kendala Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi Pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul dalam upaya pemberdayaan masyarakat Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kondisi masyarakat terlalu banyak heterogen, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, (sosial budaya), asal daerah (urban) karena banyak pemukiman perumahan terutama perumahan Bumi Tlogosari (Perumnas Tlogosari), membutuhkan strategi khusus/model khusus dalam pemberdayaan masyarakatnya.
- b. Kondisi wilayah sebagian ada daerah yang hujannya deras banjir, karena masih ada beberapa wilayah yang belum tuntas pembangunan dan penanggulangan banjir. Banjir di wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul diperparah dengan kondisi saluran selokan / drainase dilingkungan permukiman yang kurang baik /kurang normal. Dan juga merupakan banjir kiriman dari daerah wilayah atas. Daerah atau wilayah KUMIS (Kampung Kumuh dan Miskin) masih juga ada di beberapa kantong kemiskinan.
- c. Tempat PKL sudah ada dan dibangun dua tahap, tetapi penempatan para PKL belum optimal dan disipilin , yang kurang bisa tertata dengan baik. Sehingga lalu lintas tidak lancar, karena kesadaran dari PKL dan kesadaran masyarakat masih kurang untuk menempati lapak baru di sentra PKL Suryokusumo.
- d. Jumlah penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul yang berkembang cukup pesat dengan tidak diimbangi lapangan pekerjaan maka diperlukan strategi atau model dalam pemberdayaan masyarakat dari pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul. Karena dengan banyak terjadinya pengangguran maka

bisa mengakibatkan kejahatan dilingkungan. Untuk menanggulangnya yaitu pemerintahan kelurahan bekerjasama dengan lembaga komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat dengan melalui pelatihan-pelatihan masyarakat untuk bisa berwirausaha sendiri misalnya, guna meningkatkan kesejahteraan dibidang ekonomi keluarga mereka.

- e. Lembaga ditingkat kelurahan (internal) kurang maksimal dalam koordinasi, dan juga koordinasi (eksternal) dengan lembaga komunitas lokal dan aparat kepolisian (Babinkamtibmas) masih dirasakan masyarakat perlu ditingkatkan lagi.
- f. Para anak remaja atau anak putus sekolah untuk diajak sekolah dan diajak untuk ikut pelatihan-pelatihan agar bisa mandiri tidak selalu direspon dengan baik.
- g. Tempat fasilitas umum masih kurang memadai diperhatikan misalnya adanya pertamanan umum, lokasi pemakaman umum tidak mencukupi dan lapangan olah raga masih terbatas dan kurang memadai.

Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul tidak lepas dari sasaran yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin secara bertahap. Dan bias terlembaganya system kelembagaan komunitas lokal dalam penanggulangan kemiskinan kelurahan. Hal ini menjadi motor penggerak membantu Pemerintahan Kelurahan yang dapat menghimpun dan mengkoordinasikan semua sumber daya dan program penanggulangan kemiskinan pada tingkat pemerintahannya. Serta dengan meningkatnya peran dari kelembagaan komunitas lokal serta dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terutama kepedulian dan partisipasi keluarga yang tidak miskin kepada lingkungannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

D.1. Kesimpulan.

1. Fungsi Pemerintah Kelurahan Muktiharjo Kidul yaitu : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
2. Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul dalam pemberdayaan masyarakatnya tidak bisa lepas dari peran dari kelembagaan komunitas local yaitu LPMK, BKM, PKK dan lembaga lainnya membantu kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan yaitu salah satunya berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan diwilayah kelurahan, agar masyarakat lebih berdaya, mandiri dan sejahtera.
3. Pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul melalui LPMK dilihat dari tugas dan fungsinya tersebut menunjukkan perannya masih kurang berhasil optimal. Maka pemerintahan kelurahan lebih mendorong dan memfasilitasi dalam tata kelola kepengurusan dan kegiatan LPMK. Oleh karena itu masih perlu ditingkatkan menjadi LPMK yang berdaya dan mandiri dalam mengemban 3 (tiga) tugas fungsinya membantu pemerintahan Kelurahan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4. Adanya penguatan kapasitas, koordinasi dan rembug dari Pemerintah Kelurahan dengan lembaga lain (misalnya LPMK, BKM, PKK dll) dan tokoh masyarakat saat perencanaan sampai evaluasi program. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan RT/RW dan tokoh masyarakat ditingkat kelurahan untuk lebih mendorong partisipasi maupun kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga wujud keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat lebih optimal.

5. Tim Penggerak PKK Kelurahan Muktiharjo Kidul berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak dalam pemberdayaan masyarakat ditingkat PKK RW dan PKK RT yang selama ini sudah berhasil dengan cukup baik.

D.2. Saran / Rekomendasi :

1. Pemerintahan Kelurahan perlu memberikan penguatan peran kelembagaan komunitas lokal khususnya LPMK agar lebih solid dan optimal melaksanakan tugas fungsinya. Mengoptimalkan peran LPMK jadi lembaga yang berdaya dan didukung oleh Forum RW, dengan mengangkat issue permasalahan masyarakat kelurahan terkait usulan musrenbang. Inisiasi kegiatan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang siap kerja mandiri dan dibutuhkan masyarakat lingkungan beserta pendampingannya. Dan membangkitkan kembali pasar sabtu-minggu sebagai lahan pemasaran bagi masyarakat lingkungan kelurahan agar dinamika perekonomian meningkat.
2. Perlu ditingkatkan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul. Dan lebih didorong terlaksananya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kelurahan. Dioptimalkan pula pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya yang ada di kelurahan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mustofa dan Soekartawi., *Masalah Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Makalah., tt,tth. 1999
- Abu Huraerah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. Bandung
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. *Basics of Qualitatif Research* Cetakan Pertama, Juli 2003 PP.2003.38
- Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Arif, Syaiful,. *Menolak Pembangunanisme*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Bakhit, Izzadin et. all, *Attacking The Roots of Poverty*, Yakoma-PGI, Jakarta, 1996
- Bambang Rudito. Arif Budimanta, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development* Cetakan Pertama. ICSD & FKPM, 2003
- Bintarto, interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1989
- Chambers, Robert, *People : From Impoverishment to Empowerment*, New York University Press 1995
- Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Gunawan Sumodiningrat (1997). *Pembngunan Daerah dan pemberdayaan Masyarakat* ,PT Bina Rena Pariwara, jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (1999),*Agenda Pemulihan Ekonomi, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui pemberdayaan dan otonomi daerah* ,Kipas Putih Aksara, Jakarta
- Gunawan Sumodiningrat (2009) (editor : Aribowo Suprajitno Adhi). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, Menanggulangi Kemiskinan dengan prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo /Gramedia, Jakarta
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung
- Kartsasmita, Ginanjar; *Pembangunan Untuk Rakyat*, SIDES, Jakarta, 1996.

- Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Korten, DC., 1988, *Community Organization and Rural Development ; A Learning Pricces Approach Publik Administration Review*, Vol 40, No 5, Sept – Oktober : 480 – 511
- Long, N.. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1992
- Matthew B. Miles & Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Cetakan Pertama, Universitas Indonesia. Salemba 4. Jakarta. 1992
- Nasikun, Dr, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, PT Tiara Wacana Jakarta,1996
- Nurdin Widodo Dan Suradi. *Penelitian Profil Dan Peranan Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat*.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Siahaan, H.M. 1993. *Dimensi Struktural don Kultural Kemiskinan Pedesaan* Surabaya Post, Senin, 3 Maret 1993.
- Sondang P.Siagian, Prof,Dr, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung ,Jakarta, 1995
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta November 2002.
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance* , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*.Bandung : PT. Refika Aditama
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model,Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang:Bayumedia Publishing.
- Sumodiningrat, Gunawan dkk.; *Kemiskinan Teori Fakta dan Kebijakan*, Impac, Jakarta,
- The Liang Gie, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Todaro, P Michael, *Economic Development Seventh Edition Pearson Education Limited. 2000.*

Totok Mardikato, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2013

Uphoff Norman., *Local Institutional Development: An Analytical Source Book With Cases, Rural Development Committee, Cornell University. 1986.*

DPU, Ditjen Cipta Karya (2009), *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta

DPU, Ditjen Cipta Karya (2008-2010) , *Modul-modul Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, TOT Pemandu Nasional PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta

Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta. September 2005

Kep. Mendagri No. 411.4-401 tahun 2005 tentang PKK

Peraturan Mensos No 83/HUK/2005 tentang Karang Taruna

Perda No. 4 th. 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Semarang.

PP Nomer 72 Tahun 2005 tentang BPD

PP Nomer 73 Tahun 2005 tentang LPM

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Teknis P2KP 1 Tahap 2*. Jakarta

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, *Buku Pedoman Umum cetakan pertama*. Jakarta September 2004

UU No. 23 th.2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan